

ANDI SUWIRTA & SRI REDJEKI ROSDIANTI

Pendidikan IPS-Geografi dalam Perspektif Global: Peranan dan Tantangannya dalam Konteks ke-Indonesia-an

IKHTISAR: Pendidikan IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial), khususnya pendidikan Geografi, harus memberikan kesadaran tentang kondisi ruang dengan segala dimensi dan problematikanya. Sejak di lingkungan sekolah dan keluarga, peserta didik dibiasakan untuk menata, memanfaatkan, dan mencintai ruang di lingkungannya. Namun seiring dengan kemajuan zaman, yang ditandai oleh perkembangan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi), sikap manusia terhadap alam dan lingkungannya juga mengalami perubahan. Justru itu, inilah tugas pendidikan IPS, khususnya pendidikan Geografi, untuk membekali dan memberikan kesadaran tentang keruangan dalam konteks kehidupan budaya global. Dalam waktu yang sama, pendidikan IPS, khususnya pendidikan Geografi, juga tetap memberikan bekal dan kesadaran tentang keruangan dalam konteks budaya nasional dan bahkan lokal. Dengan begini maka peserta didik tetap dapat berpikir dan berwawasan global, bersikap nasional, dan bertindak dalam konteks lokal dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dengan demikian, fenomena globalisasi bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti dan dihindari, namun harus disambut, diapresiasi, dan diaktualisasikan dalam konteks kehidupan budaya nasional dan lokal di Indonesia.

KATA KUNCI: Ilmu Pengetahuan Sosial, pendidikan Geografi, dimensi ruang, peserta didik, serta wawasan lokal, nasional, dan global.

ABSTRACT: "Geography and Social Studies Education in the Global Perspective: Its Roles and Challenges in the Indonesian Context". Social Studies education, Geography education in particular, must give awareness about the condition of the space with all its dimensions and problems. Since in the school and family environments, learners accustomed to organize, harness, and loved the space in the environment. But along with the progress of time, which is characterized by the development of Science and Technology, human attitudes toward nature and the environment is also changing. Exactly, this is the task of Social Studies education, Geography education in particular, to equip and provide spatial awareness in the context of global cultural life. At the same time, Social Studies education, particularly Geography education, also continued to provide supplies and spatial awareness in the context of national and even local culture. In this way, students can still thinking in global perspective, national attitude, and act in a local context in their daily lives. Thus, the phenomenon of globalization is not something to be feared and avoided, but should be welcomed, appreciated, and actualized in the context of national and local cultural life in Indonesia.

KEY WORD: Social Studies education, Geography education, dimensions of the space, students, and insight into local, national, and global.

PENDAHULUAN

Bahwa jumlah dan kualitas penduduk suatu negara itu penting, tidak hanya menurut perspektif sekarang, tetapi juga pada masa lalu. Sebagaimana dikemukakan oleh Merle C. Ricklefs (1993:60-68), sejarawan *Indonesianist* dari Australia, bahwa kerajaan-kerajaan di Indonesia pada zaman dulu melihat penduduk

sebagai sumber produksi, tenaga kerja, tenaga militer, serta sumber pajak dan pasar untuk kemegahan dan kemakmuran sebuah kerajaan besar.

Bahkan pada zaman setelah Indonesia merdeka, sekitar tahun 1950/1960-an, Presiden Soekarno dengan bangga menyatakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar,

About the Authors: Andi Suwirta, M.Hum. adalah Dosen Senior di Departemen Pendidikan Sejarah, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial UPI (Universitas Pendidikan Indonesia) di Bandung; dan Sri Redjeki Rosdianti, M.M.Pd. adalah Guru IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) di SMP (Sekolah Menengah Pertama) Labschool UPI Kampus Cibiru, Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Alamat emel: andisuwirta@yahoo.com

How to cite this article? Suwirta, Andi & Sri Redjeki Rosdianti. (2014). "Pendidikan IPS-Geografi dalam Perspektif Global: Peranan dan Tantangannya dalam Konteks ke-Indonesia-an" in ATIKAN: *Jurnal Kajian Pendidikan*, Vol. 4(1) June, pp.85-94. Bandung, Indonesia: Minda Masagi Press and UNSUR Cianjur, ISSN 2088-1290. Available online also at: www.atikan-jurnal.com

Chronicle of the article: Accepted (May 18, 2013); Revised (August 5, 2014); and Published (June 29, 2014).

karena jumlah penduduknya yang juga besar. Hanya pada zaman Orde Baru, di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, jumlah penduduk Indonesia dibatasi melalui Program KB (Keluarga Berencana) dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia)-nya (Roeder, 1983:98). Dengan demikian, jika pada awal kemerdekaan Indonesia jumlah penduduk itu sebanyak 70,000,000; maka sekarang, setelah Indonesia merdeka lebih dari setengah abad, jumlah penduduk Indonesia mencapai lebih dari 250,000,000 jiwa. Padahal, di sisi lain, kondisi ruang (Geografi) dan SDA (Sumber Daya Alam) Indonesia bersifat tetap atau malah semakin menyusut.

Jumlah penduduk yang banyak itu memang membawa persoalan tersendiri, manakala tidak dibarengi dengan usaha-usaha untuk meningkatkan kualitas SDM-nya. Penduduk yang besar, tanpa dibarengi SDM yang berkualitas, akan menjadi beban bagi negara karena secara ekonomi dan sosial jelas kurang produktif dan kurang mandiri (Singarimbun & Penny, 1984:40-47). Bahkan keadaan yang demikian hanya akan dimanfaatkan oleh negara-negara lain yang sudah maju, untuk dijadikan pangsa pasar ekonomi yang potensial dan konsumtif.

Negara Indonesia yang secara geografis luas wilayahnya dan kaya SDA-nya, karena SDM-nya kurang berkualitas, hanya bisa dimanfaatkan oleh negara-negara lain yang sudah maju dan berkualitas SDM-nya. Sudah menjadi pengetahuan umum, bagaimana kekayaan laut kita dan kekayaan alam kita kurang bisa dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan kesejahteraan dan kemajuan bangsa kita. Dalam banyak hal, SDA negara Indonesia masih dieksplorasi dan dieksploitasi oleh negara-negara lain yang sudah maju untuk, tentu saja, kepentingan mereka.

Di “Era Perdagangan Bebas” pada abad ke-21 ini jelas, masalah kualitas dan kuantitas penduduk menjadi taruhan untuk kemajuan dan kesejahteraan sebuah negara-bangsa (*nation-state*). Persaingan di bidang ekonomi, industri, dan teknologi informasi adalah persaingan yang melibatkan SDM suatu negara-bangsa. Hanya negara-bangsa yang SDM-nya unggul, kata Paul Kennedy (1995),

yang akan keluar sebagai pemenang (*the winner*) pada abad ke-21 ini. Karena itu, peran dan fungsi pendidikan sebagai pengusung SDM yang berkualitas menjadi sangat strategis dan penting.

Lembaga-lembaga pendidikan tinggi di Indonesia juga sudah waktunya melakukan refleksi dan aksi nyata untuk menunjukkan perannya memajukan dan mensejahterakan masyarakat Indonesia, setelah lebih dari 60 tahun merdeka (Djojonegoro, 1995). Lembaga-lembaga pendidikan tinggi, seperti ITB (Institut Teknologi Bandung), IPB (Institut Pertanian Bogor), dan Universitas-universitas terkenal – termasuk UPI (Universitas Pendidikan Indonesia) – yang memiliki Fakultas-fakultas yang relevan dengan pengembangan SDM dan SDA, sudah harus menunjukkan kiprahnya memajukan bangsa Indonesia di tengah-tengah persaingan global sebagai bangsa yang bermartabat dan sejajar dengan bangsa-bangsa lain.

Masalah kependudukan di Indonesia, selain kuantitas yang kurang dibarengi dengan kualitas, adalah karena penyebarannya yang tidak merata. Sudah sejak zaman penjajahan Belanda, tepatnya zaman VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*) pada abad ke-17, pulau Jawa dijadikan sebagai pusat politik, ekonomi, dan pemerintahan. Karena itu pembangunan ekonomi, pertumbuhan penduduk, kemajuan sosial lainnya lebih banyak berkembang di Jawa, sedangkan keadaan di luar Jawa mengalami perkembangan yang stagnan karena SDM-nya juga banyak yang bermigrasi ke Jawa.

Betapapun pada awal abad ke-20, pemerintah kolonial Belanda menyelenggarakan program “kolonisasi” (yang kemudian dikenal dengan program “transmigrasi”) sebagai bagian dari Politik Etis (*Etische Politiek*), namun pemindahan penduduk ke luar Jawa itu tidak dibarengi dengan pembangunan ekonomi dan sosial di luar Jawa, sehingga menjadikan masyarakat Indonesia lebih banyak berpikir dan terobsesi oleh cara pandang “*Jawa sentrisme*” (kalau ingin maju dan berkembang harus datang dan hidup di Jawa). Setelah Indonesia merdeka pun keadaan ini tidak banyak berubah, bahkan ditambah dengan kecenderungan umum, yakni

semakin timpangnya pembangunan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan SDM – tidak hanya antara Jawa dan luar Jawa – tetapi juga antara kawasan Indonesia bagian Barat dengan kawasan Indonesia bagian Timur.

Ketika pemerintah Orde Baru runtuh pada tahun 1998, muncul semangat Reformasi untuk menerapkan Otonomi Daerah. Sejak awal abad ke-21, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan Otonomi Daerah di tingkat kabupaten (Djalal & Supriadi eds., 2001). Dalam implementasinya, ternyata banyak sisi positif dan negatifnya. Sisi positifnya, pemerintah daerah diberi wewenang penuh untuk memenej dan memanfaatkan SDM dan SDA-nya seoptimal mungkin untuk kepentingan kesejahteraan dan kemajuan daerah bersangkutan. Sedangkan sisi negatifnya, Otonomi Daerah (OTDA) ini telah menimbulkan semangat “primordialisme” yang ditandai oleh fenomena para Bupati sebagai “raja-raja kecil” atau perlunya kepemimpinan “putera daerah” yang bisa mengancam integrasi NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Masalah lain yang dihadapi OTDA, sebagaimana masalah umum di atas, tidak meratanya kondisi dan distribusi SDM dan SDA di daerah-daerah di Indonesia. Dengan demikian, ada daerah yang benar-benar siap dan bersemangat untuk melaksanakan OTDA karena didukung oleh SDM yang maju dan SDA yang kaya, tetapi ada juga – dan bahkan banyak – daerah-daerah yang keadaan sebaliknya, yakni kekurangan SDM dan SDA yang memadai.

Sekaitan dengan itu, SDM yang berkualitas jelas memegang peranan penting dalam pelaksanaan OTDA. SDA juga penting, tetapi kalau tidak dapat dikelola dan dimanfaatkan oleh SDM yang berkualitas, maka SDA itu menjadi mubazir dan potensial saja sifatnya. Nampaknya ada dua hal yang bisa ditempuh untuk meningkatkan kualitas SDM dalam kerangka OTDA. *Pertama*, memacu dan membina sektor pendidikan yang ada di daerah sebagai sarana peningkatan kualitas SDM. *Kedua*, memanfaatkan dan mendayagunakan SDM yang berkualitas – betapapun berasal dari daerah lain – untuk memajukan daerah bersangkutan. Hal yang terakhir ini tidak mesti dimaknai secara sempit.

Dalam perspektif sejarah, betapa banyak daerah dan lembaga tertentu yang karena SDM yang berkualitas di daerah dan lembaga tersebut belum tersedia, maka memanfaatkan SDM dari daerah lain. Tentara Siliwangi di Jawa Barat, misalnya, pada awal-awal berdirinya tidak dipimpin oleh orang Sunda, tetapi dipimpin oleh orang Sumatera, Kolonel A.H. Nasution (Crouch, 1984:103). Begitu juga dengan lembaga pendidikan tinggi, seperti UPI misalnya, yang pada awal-awal berdirinya dipimpin tidak oleh orang Sunda tetapi oleh orang Sumatera, yaitu Prof. Mr. Muhammad Yamin; dan orang Jawa, yaitu Prof. Dr. Mas Sadarjoen Siswomartojo dan Prof. Dr. Roeslan Abdulgani (Suwarta et al., 2003). Jika hal seperti ini dilakukan, maka semangat dan implementasi OTDA itu tetap dalam konteks NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Dan daerah-daerah yang maju dan sejahtera itu pada gilirannya juga akan memajukan NKRI secara nasional.

KEDUDUKAN DAN PERANAN PENDIDIKAN IPS-GEOGRAFI DI INDONESIA

Salah satu tujuan pendidikan Geografi adalah agar peserta didik – yang akan menjadi generasi penerus bangsa – memiliki kesadaran tentang ruang dengan segala dimensinya (Daldjoeni, 1984). Dalam konteks dan semangat nasionalisme, tujuan ini lebih jauh adalah agar para peserta didik mengenal dan mencintai Tanah Air mereka. Mengetahui dan mencintai Tanah Air itu dilakukan melalui pengalaman langsung dengan mengunjungi tempat-tempat penting, membuat peta, mengenal SDA (Sumber Daya Alam), serta memanfaatkan dan memeliharanya untuk kepentingan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Kesadaran tentang ruang, dalam konteks waktu dengan aktivitas manusia yang dilandasi oleh nilai-nilai dan moral yang luhur, inilah yang semestinya diusung oleh Pendidikan IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial), termasuk pendidikan Geografi.

Namun seiring dengan kemajuan zaman, yang ditandai dengan perkembangan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi), sikap manusia terhadap alam dan lingkungannya juga mengalami perubahan. Sebagaimana ditunjukkan oleh Van Peursen (1989), jika

pada masyarakat pra-industri manusia sangat tergantung pada alam, maka setelah IPTEK berkembang, manusia ingin menguasai dan mengeksploitasi alam, dimana sikap yang terakhir ini pada gilirannya telah merusak lingkungan alam. Penebangan hutan, pencemaran lingkungan oleh limbah industri, dan pengerukkan bahan-bahan tambang dan mineral tanpa memperhitungkan kelestariannya untuk generasi yang akan datang merupakan fenomena arogansi manusia pada alam sekitarnya.

Sikap manusia yang arogan ini, secara kolektif dalam tatanan global, pada gilirannya turut mengganggu keseimbangan antara kehidupan manusia dengan alam. “Bumi makin panas” dalam pengertian yang luas – tidak hanya secara geologi dan geografi mengalami perubahan yang signifikan, tetapi juga turut mempengaruhi pola kehidupan manusia secara sosial, politik, ekonomi, dan budaya – serta merupakan tantangan umat manusia pada abad ke-21 ini.

Pendidikan IPS, khususnya pendidikan Geografi, harus memberikan kesadaran tentang kondisi ruang dengan segala dimensi dan problematikanya. Sejak di lingkungan sekolah dan keluarga, peserta didik dibiasakan untuk menata, memanfaatkan, dan mencintai ruang di lingkungannya. Pemerintah dan masyarakat juga turut membantu menciptakan iklim dan ruang yang kondusif bagi ekspresi dan artikulasi anak-anak muda, sehingga perkembangan jiwa, sikap, mental, dan intelektualnya menjadi sehat. Sebab, sebagaimana ditunjukkan oleh sebuah studi, bahwa penataan ruang dan tata kota yang sehat juga turut mempengaruhi perkembangan sosial dan budaya masyarakatnya yang juga sehat (Harmaini, 1996). Dengan demikian maka “degradasi moral” yang dihadapi oleh generasi muda dewasa ini akan bisa diatasi dengan menata kembali konsep keruangan yang sehat dan meyakinkan paradigma berpikir bahwa lingkungan yang sehat dan tertata dengan baik pada gilirannya juga akan melahirkan masyarakat yang sehat dan baik pula.

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk. Secara geografis dan demografis, masyarakat Indonesia adalah masyarakat kepulauan yang penyebaran

penduduknya tidak merata, namun terus mengalami perkembangan jumlah yang pesat. Secara budaya, masyarakat Indonesia juga beragam. Aneka bahasa, adat-istiadat, sistem kekerabatan, dan agama-agama besar tumbuh dengan subur di Indonesia. Betapapun begitu, semua diikat oleh semangat *Bhinneka Tunggal Ika* (berbeda-beda namun satu juga) dan oleh semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 yang mengakui tanah air, bangsa, dan bahasa Indonesia sebagai satu kesatuan di bawah NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia (Cribb & Brown, 1995:1-16). Walaupun demikian, dalam perspektif global, Indonesia adalah salah satu *nation-state* (negara-bangsa) yang lahir pada pertengahan abad ke-20 di tengah-tengah negara-bangsa lainnya di dunia. Apa yang terjadi dan berkembang di dunia global, dengan demikian, akan turut mempengaruhi kehidupan di tingkat nasional, bahkan lokal.

Adalah para futurolog, di antaranya John Naisbitt & Patricia Aburdene (1990), yang menyatakan tentang adanya “*Global Paradox*”. Di satu sisi, kehidupan masyarakat dunia ditandai oleh kemajuan dan kesejahteraan menuju homogenitas budaya liberalisme, kapitalisme, industri, dan teknologi informasi. Namun di sisi lain, dalam masyarakat global yang cenderung homogen itu mulai muncul “paradoks” berupa heterogenitas yang ditandai oleh semangat nasionalisme dan primordialisme yang semakin kuat.

Dua entitas sosial terakhir itu, nasionalisme dan primordialisme, yang semestinya luruh dalam arus globalisasi yang homogen, malah menunjukkan eksistensinya kembali. Inilah yang meyakinkan para ahli Ilmu Sosial dan Kemanusiaan bahwa masalah nasionalitas dan etnisitas di suatu negara nampaknya tidak akan hilang di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang semakin mengglobal.

Inilah pula tugas pendidikan IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial), khususnya pendidikan Geografi, untuk membekali dan memberikan kesadaran tentang keruangan dalam konteks kehidupan budaya global yang, menurut Francis Fukuyama (2001), ditandai oleh kemenangan ideologi liberalisme, kapitalisme, perkembangan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi), serta demokrasi di hampir semua penjuru negara-negara di dunia.

Dalam waktu yang sama, pendidikan IPS, khususnya pendidikan Geografi, juga tetap memberikan bekal dan kesadaran tentang keruangan dalam konteks budaya nasional dan bahkan lokal. Entitas budaya nasional dan lokal ini, pada gilirannya, akan memberikan ciri khas, identitas, dan jatidiri negara-bangsa bersangkutan di tengah-tengah kehidupan, kerjasama, dan persaingan global. Dengan begini, maka peserta didik sebagai warga sebuah komunitas lokal, nasional, dan global akan dapat “berpikir dan berwawasan global, bersikap nasional, dan bertindak dalam konteks lokal” dalam kehidupan sehari-hari mereka. Fenomena globalisasi, dengan demikian, bukan sesuatu yang harus ditakuti dan dihindari namun perlu disambut, diapresiasi, dan diaktualisasikan dalam konteks kehidupan budaya nasional dan lokal mereka masing-masing.

TANTANGAN GEO-POLITIK DAN IMPLIKASINYA BAGI PENDIDIKAN IPS-GEOGRAFI DI INDONESIA

Bahwa Indonesia, secara geografis, menempati posisi strategis sudah diketahui dan diakui secara umum. Dalam studinya tentang Indonesia, B.H.M. Vlekke (1956) menyatakan bahwa negeri ini merupakan kawasan penting berbentuk “nusantara” karena berada di antara dua benua (Asia dan Australia) serta dua samudera (samudera Pasifik dan Samudera Hindia). Hal ini ditegaskan lebih lanjut oleh Denys Lombard, sejarawan *Indonesianist* dari Perancis, dalam studinya tentang *Nusa Jawa: Silang Budaya* (1998), yang menyatakan bahwa kebudayaan, peradaban, dan tradisi besar (*the great tradition*) juga tumbuh dan berkembang di kawasan ini, karena sejak dahulu sampai sekarang masyarakat Indonesia bersifat terbuka (*open society*) untuk menerima berbagai pengaruh dari luar.

Dalam perspektif sejarah Indonesia modern, kita juga melihat bahwa munculnya gerakan nasionalisme, lahirnya NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), dan bahkan dinamika sosial-politik di Indonesia, dalam banyak hal, tidak bisa dilepaskan dari pengaruh-pengaruh luar. Karena itu menjadi penting bagi kita untuk selalu mencermati, merespons, dan bersifat terbuka terhadap aneka peristiwa dan

fenomena yang sedang melanda dunia.

Pada akhir tahun 1960-an, Indonesia, bersama-sama dengan negara-negara lain di Asia Tenggara, sepakat untuk membentuk ASEAN (*Association of South East Asia Nations*). Pembentukan organisasi yang bersifat sosial, politik, ekonomi, dan budaya di kawasan Asia Tenggara ini merupakan tantangan dan peluang tersendiri bagi Indonesia karena dua hal.

Pertama, sebagai negara yang dipandang sebagai “*the big brother*” (karena besar penduduk dan luas wilayahnya) oleh negara-negara di Asia Tenggara, Indonesia mesti menunjukkan sikap politik yang matang, dewasa, dan berwibawa sebagai faktor stabilitas di kawasan Asia Tenggara. *Kedua*, dalam waktu yang sama Indonesia harus menunjukkan sebagai negara-bangsa yang maju, modern, dan demokrasi, baik di bidang sosial, politik, dan ekonomi, maupun budaya (Fortuna Anwar, 1995). Bagian yang terakhir ini nampaknya belum bisa terlaksana, dan ini agenda besar bagi generasi yang akan datang, karena krisis ekonomi pada tahun 1997 – yang disusul dengan krisis-krisis lainnya – sampai sekarang telah menjadikan keadaan sosial-politik di Indonesia belum sepenuhnya stabil.

Begitu juga pada tahun 1990-an, kita menyaksikan di kawasan Asia-Pasifik munculnya negara-negara industri baru atau NICs (*New Industrial Countries*), seperti: Korea Selatan, Taiwan, Hongkong, dan Singapura. Sebelum krisis ekonomi tahun 1997, Indonesia pun – bersama-sama dengan Thailand dan Malaysia – diprediksikan dan ikategorikan kedalam NICs (Schwarz, 2000). Namun sampai sekarang, harapan itu belum menjadi kenyataan.

Pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21 ini, dengan demikian, Indonesia yang berada di kawasan Asia-Pasifik menghadapi tantangan dan peluang yang tidak ringan. Di satu sisi, harus bisa mengejar ketinggalan dari negara-negara lain yang sudah maju; dan di sisi lain, harus bisa memainkan peranan politik, sosial, ekonomi, dan budayanya sebagai bangsa yang besar di tengah-tengah pergaulan masyarakat internasional yang maju. Tanpa kesadaran tentang peluang dan tantangan itu, Indonesia akan menjadi negara dan bangsa yang dijadikan objek semata oleh negara-negara lain,

yang sudah maju untuk kepentingan politik, ekonomi, militer, dan sosial-budaya mereka.

Sebagaimana dimaklumi bahwa masyarakat Indonesia adalah majemuk, baik secara etnis, agama, daerah, dan bahasa maupun adat-istiadat. Para pengamat dan ilmuwan Barat sering menggambarkan masyarakat Indonesia ini sebagai “*unity in diversity*” (Grunebaum, 1983). Fakta sosial ini oleh *the founding fathers* (para pendiri negara) Republik Indonesia secara singkat dan padat, disimbolkan dalam lambang negara kita, burung Garuda, dengan motto: “*Bhinneka Tunggal Ika*” yang artinya “walaupun berbeda-beda namun satu juga”.

Dengan kondisi seperti ini, sejak awal proses pendidikan, para peserta didik harus diperkenalkan tentang kemajemukan masyarakat kita. Dan pendidikan Geografi sangat berperan signifikan untuk memberikan kesadaran majemuk tentang keruangan dengan dimensi-dimensi yang terkait di dalamnya. Peserta didik diperkenalkan, ditunjukkan, dan diajak secara langsung untuk melihat keragaman etnis, kondisi geografis, agama, bahasa, dan adat-istiadat masyarakat Indonesia.

Ada baiknya juga sekali-kali mereka diajak melihat dan mengunjungi TMII (Taman Mini Indonesia Indah), sebagai representasi Indonesia dalam bentuk miniatur. Dengan begitu akan tumbuh kesadaran dan kecintaan sebagai warga negara Indonesia yang menghargai perbedaan, bersikap toleran, demokratis, mau bekerja sama, dan saling menghormati.

Sementara itu, dalam waktu yang sama, peserta didik juga diperkenalkan tentang negara Indonesia di tengah-tengah masyarakat negara-bangsa di dunia. Dalam masyarakat negara-bangsa di dunia internasional ini realitas kemajemukan semakin kompleks, tidak hanya dalam hal ras, bangsa, bahasa, sistem bernegara dengan simbol-simbol kebanggaannya, agama, dan kondisi geografis, tetapi juga dalam hal tingkat kemajuan dan kemakmuran.

Pada tahap awal proses pembelajaran, peserta didik diperkenalkan dan ditunjukkan tentang peta dunia yang terdiri dari lima benua, ratusan negara-bangsa, hasil-hasil kebudayaan yang terkenal di dunia, kepala-

kepala negara yang terkenal, gunung tertinggi, sungai terpanjang, agama-agama besar, dan bendera-bendera kebanggaan negara-bangsa di dunia. Selanjutnya, peserta didik diajak untuk melihat dan menggolongkan negara-negara yang maju dan negara-negara yang masih berkembang. Dengan begini, secara tidak langsung, peserta didik diajak untuk berpikir dan menyadari tentang kemajemukan masyarakat negara-bangsa di dunia di satu sisi, dan di sisi lain dimotivasi semangatnya untuk berkompetisi dan berkolaborasi dengan warga negara-bangsa lain di dunia demi kemajuan, kemakmuran, kedamaian, keamanan, dan kebebasan hidup bersama.

Wilayah Indonesia, yang terbentang dari Sabang di Aceh sampai Merauke di Papua, secara geografis adalah wilayah kepulauan yang, dengan demikian, terdiri atas daratan dan lautan. Daratan Indonesia, walaupun berbentuk pulau-pulau dan jumlahnya mencapai sekitar 13,000 pulau, hanya 1/3 saja dari luas lautan kita yang luas (Wilhelm, 1990). Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya – baik di daratan dan terutama di lautan – belum tergali dan dimanfaatkan secara maksimal oleh bangsa kita sendiri. Begitu juga dengan sarana transportasi sebagai urat nadi integrasi bangsa Indonesia belum dipikirkan, dirancang, dan dioperasikan untuk kepentingan-kepentingan strategis ke depan sebagai bangsa dengan luas wilayah yang besar.

Adalah sebuah ironi sejarah bahwa bangsa Indonesia yang sejak dahulu sebenarnya termasuk sebagai bangsa “bahari”, dalam perkembangan selanjutnya, kurang memperhatikan masalah dan potensi kebaharian kita (Lapian, 1992). Dalam banyak hal, dengan demikian, kita masih berorientasi pada daratan yang, padahal, luasnya hanya 1/3 saja dari luas wilayah Indonesia, dibandingkan dengan 2/3 dari luas lautannya.

Para sejarawan dan ahli Ilmu-ilmu Sosial berpendapat bahwa perubahan orientasi bangsa Indonesia dari bahari ke daratan itu dimulai sejak zaman kerajaan Mataram Islam di Jawa pada abad 16 (Moertono, 1987; dan Ricklefs, 1992). Kerajaan Mataram Islam telah memindahkan pusat kekuasaannya dari daerah pesisir ke pedalaman. Kerajaan Mataram Islam, dengan demikian, turut mengubah orientasi

dan tradisi dari kerajaan-kerajaan di Indonesia yang semula bersifat maritim – seperti kerajaan Majapahit, Sriwijaya, Banten, Cirebon, Demak, Samudera Pasai, Aceh, dan Makasar – menjadi kerajaan yang bersifat agraris.

Akibatnya, menurut Taufik Abdullah (1987:143), sejarawan terkenal Indonesia, kekuatan ekonomi, agama, dan politik kerajaan yang dilambangkan dengan “pasar, mesjid, dan keraton” mengalami disfungsi. Padahal, pada saat yang sama, kekuatan Barat (dalam hal ini VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*) Belanda, datang dengan kekuatan ekonomi pasar, teknologi, organisasi, dan monopolinya sehingga dapat mengalahkan kerajaan-kerajaan di Indonesia dan menguasainya sampai tahun 1942.

Sejak Indonesia merdeka (1945), sampai sekarang, perhatian terhadap masalah kelautan juga belum banyak mengalami perubahan. Perguruan-perguruan tinggi di Indonesia lebih banyak memiliki Fakultas Pertanian dari pada Fakultas Kelautan misalnya. Kementerian Pertanian dalam birokrasi pemerintahan kita lebih dulu ada daripada Kementerian Kelautan. Bahkan militer kita juga lebih banyak mengembangkan kekuatan TNI (Tentara Nasional Indonesia) Angkatan Darat dari pada TNI Angkatan Laut dan Angkatan Udara, dimana yang terakhir ini (khususnya TNI Angkatan Laut) banyak menimbulkan rumor politik yang tidak sedap.

Begitulah, misalnya, kapal-kapal TNI Angkatan Laut kita tidak mampu melakukan patroli di sepanjang pantai dan kepulauan Indonesia yang luas. Kapal-kapal patroli TNI Angkatan Laut kita juga tidak mampu mengejar dan menangkap kapal-kapal pencuri ikan dan penjarah kekayaan laut kita dari negara-negara maju. Bahkan pada zaman Orde Baru, di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto (1966-1998), ketika Menteri Luar Negeri, Mochtar Kusumaatmadja, ditanya oleh wartawan “*Apa yang akan dilakukan oleh TNI Angkatan Laut Indonesia jika melihat Angkatan Laut Amerika Serikat, Armada VII, melintas dan melanggar wilayah kedaulatan kita?*”, maka jawabannya secara diplomatik adalah: “*Kita pura-pura tidak melihat saja*”.

Atas dasar kenyataan-kenyataan di atas, maka strategi-strategi kewilayahan kita di

masa-masa yang akan datang harus mengalami perubahan. Teknologisfer kita, baik yang berkenaan dengan transportasi laut, udara, satelit PALAPA, jaringan mercusuar, sarana pelabuhan modern, maupun sarana komunikasi lainnya harus terus diperbaiki, ditingkatkan, dan dimiliki sepenuhnya oleh bangsa Indonesia sendiri. Tanpa penguasaan yang memadai terhadap perangkat lunak dan keras dari teknologisfer kita, integrasi dan kedaulatan wilayah Indonesia akan terganggu dan mudah dipenetrasi oleh kekuatan-keuatan luar yang memiliki perangkat sains dan teknologi lebih modern. Industri-industri strategis kita tentang kelautan (seperti PT PAL di Surabaya) dan kedirgantaraan (seperti PT Nurtanio di Bandung) juga harus terus dioptimalkan kembali untuk menjawab tantangan-tantangan global di masa mendatang yang penuh dengan kompetisi, kolaborasi, dan ko-eksistensi damai di atas dasar kemerdekaan dan kedaulatan negara masing-masing.

KESADARAN KE-INDONESIA-AN DALAM PERSPEKTIF GLOBAL

Pendidikan IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial), khususnya pendidikan Geografi, dirancang sebagai mata pelajaran yang akan memperkenalkan dan mendekatkan peserta didik dengan lingkungannya. Mulai dari lingkungan yang paling kecil dan dekat dengan peserta didik, seperti keluarga, desa, kota, dan provinsi, sampai dengan lingkungan yang paling besar, seperti negara, kawasan regional, dan dunia. Khusus mengenai wilayah Indonesia, peserta didik harus diperkenalkan dengan kondisi geografis, kekayaan alam, potensi demografis, dan keragaman budaya Indonesia.

Indonesia sebagai negara bahari atau maritim, misalnya, mesti ditekankan sebagai kenyataan sosial yang tak terbantahkan. Dengan demikian, bukan saja sejak awal peserta didik diajak berpikir dan bernalar tentang wilayah Indonesia yang besar, kaya, dan potensial, tetapi juga dimotivasi untuk mencintai dan merasa memiliki (*sense of belonging*) bangsa dan negara Indonesia, di tengah-tengah percaturan global bangsa-bangsa lainnya di dunia (Wiriaatmadja, 2002:163-174).

Dalam banyak hal, pendidikan IPS kita, khususnya pendidikan Geografi, kurang

memberikan kesadaran kewilayahan yang maksimal terhadap peserta didik. Sejak di pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, peserta didik lebih banyak diperkenalkan dengan konsep ruang dan kewilayahan yang agraris, pegunungan yang indah, desa yang damai, dan kota di pedalaman yang ramai. Konteks pendidikan IPS, khususnya pendidikan Geografi, yang lebih menekankan matra daratan dan kurang menekankan matra kelautan itu pada masa Orde Baru, menurut Niels Mulder (2000:12), karena kepentingan dan ideologi pemerintah yang didominasi oleh militer Angkatan Darat begitu kuat.

Begitu juga dalam menjelaskan konsep keluarga, kebanyakan menggambarkan profil keluarga patriakal dalam masyarakat agraris, dimana peran Bapak begitu kuat dan dominan. Padahal, dalam masyarakat yang dinamis dan demokratis, lingkungan keluarga itu mesti digambarkan sebagai unit sosial yang egalitarian, serta memiliki fungsi dan peran komplementer. Gambaran keluarga dimana peran Bapak yang dominan dan hegemonik itu, menurut Saya Siraishi (2002), semakin memperkokoh sistem pemerintahan yang ABS (Asal Bapak Senang), korup, dan otoriter.

Karena itu pendidikan IPS, khususnya pendidikan Geografi, di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah (Pertama dan Atas) di Indonesia mesti melakukan re-orientasi dalam tujuan, struktur kurikulum, dan strategi pembelajarannya. Peserta didik mesti lebih banyak diperkenalkan dan disadarkan dengan kondisi wilayah Indonesia yang bersifat bahari dari pada agraris. Citra keluarga juga mesti digambarkan sebagai unit sosial yang demokratis, sehat, modern, dan egalitarian.

Metode pembelajaran pun, di sekolah, mesti dikondisikan untuk menciptakan peserta didik agar belajar mandiri, kreatif, dan variatif. Dengan begitu, sejak dini peserta didik sudah diperkenalkan dan disiapkan untuk memiliki nalar dan sikap tidak hanya bersifat lokal dan nasional yang dinamis dan demokratis, tetapi juga siap memasuki dan menghadapi lingkungan global yang kompetitif dan kooperatif secara sehat dan modern.

Yang dimaksud dengan “*perspektif global*” adalah suatu cara pandang atau cara berpikir terhadap suatu masalah, kejadian atau

kegiatan dari sudut pandang global, yaitu dari sisi kepentingan dunia atau internasional. Oleh karena itu, sikap dan perbuatan kita juga diarahkan untuk kepentingan global (Sumaatmadja & Wihardi, 1999:14). Dengan perspektif global, bukan berarti kepentingan nasional atau lokal direduksi untuk kepentingan masyarakat internasional; yang benar dan tepat adalah bahwa kepentingan dan perkembangan masyarakat nasional dan lokal kita tidak bisa dilepaskan dari perkembangan dan perubahan-perubahan yang terjadi di tingkat global, baik secara ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Apa yang terjadi di tingkat global, cepat atau lambat, akan berimbas pada kehidupan nasional dan lokal. Begitu juga jika kiprah dan peranan bangsa kita berhasil serta diakui oleh masyarakat internasional, maka akan mewarnai corak kehidupan global dan masyarakat negara-bangsa lainnya di dunia.

Dalam perkembangan disiplin IPS, termasuk disiplin Ilmu Sejarah dan Ilmu Geografi, pengaruh perkembangan disiplin ilmu ini di tingkat global tidak bisa dihindarkan. Pembaharuan pendidikan dan pengajaran Sejarah dengan menggunakan pendekatan Geologi atau Geografi, jelas diperkenalkan oleh para sejarawan dan ilmuwan Perancis pada akhir abad ke-20 ini. Pembaharuan itu akan turut mempengaruhi corak pengajaran dan pendidikan Sejarah di Indonesia di masa-masa yang akan datang.

Dalam pembaharuan itu dinyatakan bahwa agar peserta didik memiliki kesadaran dan pemahaman yang baik tentang sejarah bangsanya – sebagaimana juga pendidikan Geografi yang menghendaki peserta didik mencintai lingkungan sekitar – maka materi sejarah yang diajarkan mesti dimulai dari yang paling dekat dengan peta kognitif peserta didik. Jika pendidikan dan pengajaran sejarah konvensional selama ini diawali dengan pengenalan peserta didik terhadap zaman pra-sejarah dan zaman kuno yang jauh dari jangkauan dan gambaran pengetahuan anak, maka sejarah dengan model pembaharuan dan pendekatan Geologi atau Geografi ini harus dimulai dari peristiwa dan waktu yang paling dekat dan kontemporer dengan peserta didik.

Perkenalan anak dengan sejarah, dengan

demikian, dimulai dari “zaman *ayeuna* (kini) terus ke zaman *baheula* (lampau)”¹; tidak sebaliknya, sebagaimana yang lazim berlaku sekarang. Pembaharuan pendidikan sejarah dengan menggunakan pendekatan Geologi ini dipelopori oleh sejarawan Perancis terkenal, Denys Lombard (1998). Pendekatan semacam ini disebut juga “pendekatan regresi” dan merupakan tantangan tersendiri bagi para sejarawan dan pendidik sejarah di Indonesia (Sjamsuddin, 2007).

Dari penjelasan di atas menjadi jelas bahwa pilar-pilar tujuan pendidikan IPS dalam perspektif global itu meliputi: *learning to know*, *learning to do*, *learning to live together*, dan *learning to be*. Sementara itu pokok-pokok bahasan yang dapat dijadikan bahan kajian di antaranya adalah: masalah perdamaian dan keamanan, masalah pembangunan, masalah lingkungan, dan masalah HAM atau Hak Asasi Manusia (Sapriya, 2002:170-175). Dengan tujuan, bahan kajian, dan strategi pembelajaran yang demokratis seperti ini maka secara perlahan, namun pasti, kita turut mempersiapkan peserta didik yang akan siap untuk menjadi warga dunia, serta siap pula untuk berkompetisi dan berkolaborasi dalam pergaulan masyarakat internasional yang maju, modern, dan beradab.

KESIMPULAN¹

Seperti yang kami tandaskan pada bagian awal bahwa pendidikan IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial), khususnya pendidikan Geografi, harus memberikan kesadaran tentang kondisi ruang dengan segala dimensi dan problematikanya. Sejak di lingkungan sekolah dan keluarga, peserta didik dibiasakan untuk menata, memanfaatkan, dan mencintai ruang di lingkungannya. Namun seiring dengan kemajuan zaman, yang ditandai oleh

¹Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Prof. Dr. Haji Nursid Sumaatmadja, sebagai pengampu matakuliah “Geografi Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya” di Sekolah Pascasarjana UPI (Universitas Pendidikan Indonesia) pada tahun 2003, yang dengan gaya dan cara tersendiri menjadikan perkuliahan yang diampunya sangat menarik dan aktual. Artikel ini, sesungguhnya, merupakan elaborasi dan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan kritis dan kontekstual dari Profesor yang terkenal sederhana dan miskin harta, namun kaya dengan wawasan dan kearifan tersebut. Walau bagaimanapun, seluruh isi dan interpretasi dalam artikel ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab akademik kami (penulis) berdua.

perkembangan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi), sikap manusia terhadap alam dan lingkungannya juga mengalami perubahan.

Justru itu, inilah tugas pendidikan IPS, khususnya pendidikan Geografi, untuk membekali dan memberikan kesadaran tentang keruangan dalam konteks kehidupan budaya global. Dalam waktu yang sama, pendidikan IPS, khususnya pendidikan Geografi, juga tetap memberikan bekal dan kesadaran tentang keruangan dalam konteks budaya nasional dan bahkan lokal. Dengan begini maka peserta didik tetap dapat berpikir dan berwawasan global, bersikap nasional, dan bertindak dalam konteks lokal dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dengan demikian, fenomena globalisasi bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti dan dihindari, namun harus disambut, diapresiasi, dan diaktualisasikan dalam konteks kehidupan budaya nasional dan lokal di Indonesia.

Bibliografi

- Abdullah, Taufik. (1987). *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia*. Jakarta: Penerbit LP3ES.
- Cribb, Robert & Colin Brown. (1995). *Modern Indonesia: A History Since 1945*. London and New York: Longman.
- Crouch, Harold. (1984). *Militer dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Terjemahan.
- Daldjoeni, N. (1984). *Geografi Kesejajaran II: Indonesia*. Bandung: Penerbit Angkasa.
- Djalal, Fasli & Dedi Supriadi [eds]. (2001). *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita, Bappenas, dan Depdiknas.
- Djojonegoro, Wardiman. (1995). *Lima Puluh Tahun Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Depdikbud RI [Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia].
- Fortuna Anwar, Dewi. (1995). “Indonesia di Tengah Percaturan Politik dan Ekonomi Asia Tenggara”. *Hasil Penelitian Tidak Diterbitkan*. Jakarta: LIPI [Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia].
- Fukuyama, Francis. (2001). *Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal*. Yogyakarta: Penerbit Qalam, Terjemahan.
- Grunebaum, Gustave E. von. (1983). *Islam Indonesia: Kesatuan dalam Keragaman*. Jakarta: Yayasan Perkhidmatan, Terjemahan.
- Harmaini, Aslim. (1996). “Pengaruh Ruang Tata Kota terhadap Perilaku Kenakalan Remaja”. *Hasil Penelitian Tidak Diterbitkan*. Bandung: Yayasan Ilmu-ilmu Sosial.
- Kennedy, Paul. (1995). *Preparing for the Twenty-First Century*. London: P. Highman Ltd.
- Lapian, A.B. (1992). “Orang Laut, Bajak Laut, dan Raja

- Laut". *Disertasi Doktor Tidak Diterbitkan*. Yogyakarta: Program Studi Ilmu Sejarah Pascasarjana UGM [Universitas Gadjah Mada].
- Lombard, Denys. (1998). *Nusa Jawa: Silang Budaya, Jilid I*. Jakarta: PT Gramedia, Terjemahan.
- Moertono, Soemarsaid. (1987). *Negara dan Usaha Bina Negara: Studi tentang Kerajaan Mataram Islam Masa Lampau*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Terjemahan.
- Mulder, Niels. (2000). *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Naisbitt, John & Patricia Aburdene. (1990). *Megatrends 2000*. New York: William Morrow and Co Inc.
- Peursen, Van. (1989). *Strategi Kebudayaan*. Jakarta: PT Gramedia, Terjemahan.
- Ricklefs, Merle C. (1992). *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Terjemahan.
- Ricklefs, Merle C. (1993). *War, Culture, and Economy in Jawa, 1677-1726: Asian and European Imperialism in the Early Kartasura Period*. Sydney: Allen & Unwin.
- Roeder, G.O. (1983). *Biografi Soeharto: Anak Desa*. Jakarta: Penerbit CV Gunung Agung, Terjemahan.
- Sapriya. (2002). *Studi Sosial: Konsep dan Model Pembelajaran*. Bandung: Penerbit Buana Nusantara.
- Schwarz, Adam. (2000). *A Nation in Waiting: Indonesia in the 1990s*. Sydney: Allen and Unwin.
- Singarimbun, Masri & D.H. Penny. (1984). *Penduduk dan Kemiskinan*. Jakarta: Penerbit Bhratara.
- Siraishi, Saya. (2002). *Pahlawan-pahlawan Belia: Keluarga Indonesia dalam Politik*. Jakarta: Kepustakaan Gramedia Populer, Terjemahan.
- Sjamsuddin, Helius. (2007). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Sumaatmadja, Nursid & Kuswaya Wihardi. (1999). *Perspektif Global*. Jakarta: Penerbit UT [Universitas Terbuka].
- Suwirta, Andi et al. (2003). "50 Tahun Universitas Pendidikan Indonesia, 1954-2004: Dari Mas Sadarjoen Siswomartoyo hingga Mohammad Fakry Gaffar". *Hasil Penelitian Tidak Diterbitkan*. Bandung: IKA UPI [Ikatan Alumni, Universitas Pendidikan Indonesia].
- Vlekke, Bernard H.M. (1956). *Nusantara: A History of Indonesia*. 's-Gravenhage: Uitgeverij.
- Wilhelm, Donald. (1990). *Indonesia Bangkit*. Jakarta: Penerbit UI [Universitas Indonesia] Press.
- Wiriaatmadja, Rochiati. (2002). *Pendidikan Sejarah di Indonesia: Perspektif Lokal, Nasional, dan Global*. Bandung: Historia Utama Press.